

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAKARTA 2017

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE 2017 JAKARTA GOVERNOR ELECTION

Mhd. Alfahjri Sukri^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

*Corresponding author

E-mail: malfahjrisukri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This study aims to see and analyze how the public's participation in the 2017 DKI Jakarta Governor Election (Pilgub), especially in Bangka Village, Mampang Prapatan District, South Jakarta TPS 30 in the first round of the DKI Jakarta Pilkada, and how the DKI Jakarta Pilkada is held at TPS 30 2017. The research method used in this research is a qualitative method by conducting field studies, observations, collecting data through using books and documents. The results of this study indicate that the participation of the community in Bangka TPS 30 RW 5 (RT 4 and 5) is high, especially the participation of the elite (high economy) who lives in RT 5. The number of people in RT 5 is present and the low number of golput (which does not use the right to vote) indicates that the participation of the elite is high. Huntington and Nelson's statement which states that a high or good economic level will result in high participation is evident at this TPS 30. However, there are some old problems in the implementation of the first round of the DKI Jakarta Pilkada in the Bangka TPS 30 Village, namely the DPT problem, such as residents whose names are not on the DPT and the DPTb which slightly resulted in residents not being able to vote. Poor implementation of Pilkada can result in decreased community participation. But overall the Pilkada at TPS 30 went smoothly and there were no problems with religious sentiment.

Keywords: *Community Participation, DKI Jakarta, Regional Head Election*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 khususnya di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan TPS 30 pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, dan bagaimana penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta di TPS 30 tahun 2017 tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi lapangan, observasi, mengumpulkan data-data melalui buku dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Bangka TPS 30 RW 5 (RT 4 dan 5) termasuk tinggi, terutama partisipasi dari kalangan elite (ekonomi tinggi) yang tinggal di RT 5. Banyaknya masyarakat RT 5 yang hadir dan sedikitnya angka golput (yang tidak menggunakan hak pilih) menunjukkan bahwa partisipasi kaum elite tersebut tinggi. Pernyataan Huntington dan Nelson yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi yang tinggi atau baik akan menghasilkan partisipasi yang tinggi, terbukti di TPS 30 ini. Namun, terdapat beberapa

permasalahan lama pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama Kelurahan Bangka TPS 30 yaitu masalah DPT, seperti warga yang namanya tidak ada di DPT serta DPTb yang sedikit mengakibatkan warga tidak bisa memilih. Buruknya pelaksanaan Pilkada dapat berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat. Namun secara keseluruhan penyelenggaraan Pilkada di TPS 30 berjalan aman serta tidak ada masalah sentiment agama.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; DKI Jakarta; Pilkada

PENDAHULUAN

Pasca tumbang rezim Soeharto tahun 1998, Indonesia masuk era reformasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Untuk itu, dilakukanlah beberapa perubahan seperti amandemen UUD 1945, menjunjung tinggi HAM, semangat pemberantasan korupsi, dwifungsi ABRI dihapuskan, hukum ditegakkan dengan adil, pemberlakuan desentralisasi untuk keharmonisan pusat dan daerah, menjamin kebebasan pers, dan memperbaiki kehidupan demokrasi (Dewan Perwakilan Daerah, 2003).

Upaya perbaikan kehidupan demokrasi pasca Orde Baru tersebut tampak dari sistem pemilihan presiden dan kepala daerah. Presiden yang pada masa Orde Baru dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian berubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat dimulai tahun 2004 (Chalid, 2005). Perubahan juga terjadi di tingkat daerah. Pada masa Orde Baru, kepala pemerintah di tingkat daerah, tingkat satu dan dua, calon-calon dipilih secara performa oleh anggota DPR yang kemudian diajukan untuk mendapatkan restu dari atasnya. Memasuki reformasi, calon kepala daerah tidak lagi seperti Orde Baru, karena sudah bersifat

desentralisasi, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, baik itu dalam hal memilih gubernur dan wakil, walikota dan wakil, serta bupati dan wakilnya (Romli, 2018). Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat, karena keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik (Mulyadi, 2019).

Aturan memilih langsung kepala daerah tersebut berimplikasi ke semua daerah di Indonesia, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Sebelum pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, aturan yang mengatur pilkada di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sejak dilakukan Pilkada langsung sejak 2005 sampai saat sekarang ini, terjadi beberapa perubahan aturan dan juga permasalahan yang mengikutinya, mulai dari partisipasi politik masyarakat serta masalah penyelenggaraan pemilihan umum lainnya, baik nasional maupun daerah. Tinggi rendahnya partisipasi

masyarakat akan pengaruhi kualitas demokrasi Indonesia (Purwadi, 2019).

Pemilihan umum secara langsung, baik tingkat nasional maupun daerah, yang diadakan di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi. Pada pemilihan umum legislatif tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92,7 persen, namun mengalami penurunan pada 2004 yang hanya 84,06 persen. Partisipasi kemudian turun pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 menjadi 70,99 persen (Arif, 2020). Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, tingkat partisipasi pemilih sedikit meningkat menjadi 75,2 persen dan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen. Ada sedikit peningkatan partisipasi dibandingkan pemilihan umum legislatif sebelumnya (Maulana, 2014).

Sedangkan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dari tahun 2007 ke 2012 juga mengalami penurunan, tahun 2007 sebesar 66 persen, adapun pada 2012 menjadi 65 persen. Namun, pada tahun 2017 melonjak menjadi 74,6 persen yang merupakan partisipasi tertinggi masyarakat Jakarta dibandingkan pemilihan sebelumnya. Peningkatan partisipasi yang terjadi dalam Pilkada DKI putaran pertama tahun 2017 menjadi menarik untuk diteliti karena Pilkada DKI saat ini merupakan pilkada dengan cita rasa pilpres dengan banyaknya kepentingan di dalamnya serta masalah yang menyertainya (Suhada, 2017). Dalam Pilkada ini juga

kuat sentiment agama yang bermain (Hasan, 2017).

Dari fenomena meningkatnya partisipasi politik pada Pilkada DKI putaran pertama, tentu menarik untuk melihat bagaimana partisipasi politik kalangan elite di Jakarta serta bagaimana penyelenggaraan Pilkada DKI putaran pertama tahun 2017, apakah terdapat sentiment agama. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan TPS 30. TPS 30 dipilih karena menjadi salah satu TPS tempat pemilih dari kawasan perumahan elite berada. Pada TPS tersebut diikuti oleh dua RT, RT 4 merupakan kawasan perumahan biasa dan RT 5 kawasan perumahan elite.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik. Para ahli membedakan antara partisipasi politik dan mobilisasi politik. Menurut Huntington dan Nelson (1990), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam partisipasi politik, masyarakat secara sukarela untuk ikut andil dalam kegiatan politik, tanpa adanya paksaan atau kekuatan yang menggerakkan mereka.

Huntington dan Nelson (Huntington & Nelson, 1990) mengklasifikasikan ekspresi dari partisipasi politik ke dalam lima jenis perilaku politik, yaitu 1) kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk



kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan untuk seseorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. 2) *Lobbying*, 3) kegiatan organisasi, 4) mencari koneksi (*contacting*). 5) tindak kekerasan (*violence*). Dalam pandangan Huntington dan Nelson, tindak kekerasan termasuk ke dalam jenis partisipasi politik. Jadi yang disebut partisipasi politik tidak hanya kegiatan positif. Dan salah satu kegiatan positif yang masuk dalam jenis partisipasi tersebut, adalah kegiatan pemilihan umum.

Huntington dan Nelson (1990) sendiri kemudian menyatakan bahwa dalam terdapat dua jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi yang otonom yang artinya bahwa individu atau kelompok yang ikut adil dalam berpartisipasi digerakkan oleh kemauannya sendiri atau kesadarannya sendiri, dan (2) partisipasi yang mobilisasi yang diartikan bahwa individu atau kelompok ikut berpartisipasi dalam politik dengan bentuk apapun dengan adanya pengaruh dari luar atau kekuatan yang menggerakkan. Partisipasi otonom bisa saja berubah menjadi partisipasi mobilisasi, dan sebaliknya partisipasi mobilisasi bisa saja berubah menjadi partisipasi otonom, hal ini dipengaruhi oleh individu itu sendiri serta alat-alat yang dijadikan untuk mobilisasi politik yang dapat mempengaruhi partisipasi yang awalnya otonom.

Huntington dan Nelson (1990) menyatakan, terdapat korelasi antara tingkat partisipasi dan pembangunan. Tingkat sosial ekonomi dalam masyarakat yang tinggi akan menghasilkan partisipasi politik yang tinggi, dan sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah cenderung terlihat pada masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar (mapan secara ekonomi), dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari mereka yang tidak berpendidikan atau berpenghasilan rendah.

Pentingnya tingkat pendidikan ini juga dikatakan oleh Miriam Budiardjo (2011) sebagai salah satu komponen penting untuk meningkatkan partisipasi politik, karena dengan pendidikan membuat masyarakat sadar pentingnya ikut berpartisipasi dalam perpolitikan di negaranya. Meningkatnya kaum terdidik atau intelektual dalam negara berkembang dapat mempengaruhi meningkatnya partisipasi dalam masyarakat, karena kalangan inilah yang paham akan pentingnya politik (Simamora, 1985). Demokrasi dianggap baik apabila tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi, yang menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam bernegara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012).

Dengan metode kualitatif yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, khususnya di Kelurahan Bangka Jakarta Selatan TPS 30. Data diperoleh langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Observasi TPS 30

Penelitian dilakukan di Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, RW 5, TPS 30. TPS ini merupakan TPS gabungan antara warga RT 4 dan RT 5, yang menarik adalah RT 4 merupakan warga perumahan biasa, adapun RT 5 merupakan perubahan elite atau orang kaya dengan beberapa keturunan China. TPS ini diikuti oleh berbagai macam suku seperti suku Betawi, Minang, Manado, Batak, China, Sunda, dan suku lainnya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk TPS 30 diketuai oleh A. Susakam dengan enam anggotanya yaitu Sawiyah, Fauzan, M.Rosul, Samsul Bahri, Alis Iskandarsyah, dan Arie Akbar. Adapun saksi calon yaitu Farhatush Sholehah

saksi calon dari nomor urut 1 yaitu Agus Hartimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Rudy Hilmansyah saksi calon cari nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, serta Hermansyah saksi calon dari nomor urut 3 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin. Ketika penulis di lapangan, juga terdapat 3 orang saksi eksternal dari pasangan nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang diketuai oleh Sugiono. Penulis juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar.

Keterangan dari ketua RT 4 yang bernama Haji Badrun dan Sugiono (koordinator saksi luar kelurahan Bangka (tim sukses nomor 2 ahok) yang mengatakan bahwa daerah RT 4 tersebut tidak diperbolehkan untuk memasang banner ataupun atribut politik lainnya yang dapat merusak harmonisasi di masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Tindakan ini dilakukan setiap ada pemilihan umum untuk menjaga agar kondisi tetap kondusif. Oleh karena itu yang menjadi saksi pasangan calon tidak ada yang berasal dari warga asli. Dari keterangan ketua RT 4 dan beberapa warga sekitar mengatakan bahwa keharmonisan dalam masyarakat sangat penting untuk dijaga, jangan sampai karena pemilihan kepala daerah dapat mengakibatkan perpecahan. Sehingga mereka bersyukur sentiment agama dalam Pilkada DKI tidak terbawa ke daerah mereka (Badrun & Sugiono. Wawancara pribadi. 2017).

Berkaitan dengan partisipasi warga elite yang berada pada RT 5,



menurut Badrun, bahwa partisipasi warga elite sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala daerah saat ini, serta pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini juga disampaikan oleh Mamad dan Imron yang melihat semangat warga dari perumahan elite yang ikut andil dalam setiap pemilihan umum, baik nasional maupun daerah (Mamad & Imron. Wawancara pribadi.2017). Masyarakat

yang tinggal di kawasan elite (RT 5) tersebut memang diakui oleh Badrun juga terdapat keturunan-keturunan China. Dari pantauan peneliti memang juga terdapat beberapa keturunan China yang ikut andil dalam pemilihan ini. Tidak juga ditemukan narasi-narasi atau provokasi agama. Wilayah tersebut bersih dari spanduk-spanduk yang provokatif. Berikut, Tabel informasi pemilih:

Tabel 1. Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih	400
2.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih	299

Tabel 2. Data Pengguna Surat Suara

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	400
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	6
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	101
4	Jumlah surat suara yang digunakan	293

Tingginya partisipasi warga dari kawasan elite (RT 5) ini terlihat dari keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum tersebut. Jumlah DPT awal sebanyak 389 dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 11 orang. Total suara sebanyak 400 dengan 101 tidak ikut memilih. Total pengguna hak suara sebanyak 299. Dari 299 tersebut, partisipasi dari RT 5 (kawasan elite) sebanyak 181 dengan rincian 92 laki-laki dan 89 perempuan. Adapun RT 4 sebanyak 138 dengan rincian laki-laki sebanyak 53 orang dan 65 perempuan.

Sebanyak 101 orang tidak ikut memilih dengan rincian 39 orang tidak memilih dari RT 5 dan 62 orang tidak memilih dari RT 4 berdasarkan DPT tetap. Data ini dilihat berdasarkan pada daftar kehadiran yang penulis dapat dari TPS. Pada TPS 30 ini, keikutsertaan perempuan mengungguli jumlah pemilih laki-laki yaitu perempuan sebanyak 154 dan laki-laki sebanyak 145. Dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Pemilih Laki-Laki dan Perempuan di TPS 30 Kelurahan Bangka

	RT 4	RT 5	Total
Laki-Laki	53	92	145
Perempuan	65	89	154
Total			299

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat, terutama kawasan elite (RT 5), cukup tinggi sebanyak 181 orang yang ikut memilih dan 39 orang tidak ikut memilih. Total presentase masyarakat yang ikut memilih di TPS 30 gabungan RT 4 dan 5 adalah sebanyak 74.8 persen. Adapun rincian hasil pemilihan di TPS 30 yaitu nomor urut 1)

Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (64 suara), 2) Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (136 suara), dan 3) Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno (93 suara). Di TPS 30 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan 136 suara. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Final Rekapitulasi Data TPS 30 Kelurahan Bangka

Nomor Urut Dan Nama Calon	Suara Sah	%
1. Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	64	21,80
2. Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	136	46,40
3. Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno	93	31,70
Jumlah Seluruh Suara Sah	293	97,99
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	6	2,00

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017 di TPS 30 ini berlangsung aman, namun masih menyisakan beberapa permasalahan seperti 1) Ada warga yang tidak tercantum dalam DPT yang mengaku sebagai warga asli. Oleh KPPS di persilahkan untuk mencoblos di jam 12 (Daftar Pemilih tambahan), namun ia menolak. 2) Permasalahan DPT seperti warga yang sudah pindah tetapi masih terdaftar di DPT asal. 3) Permasalahan

yang unik di Jakarta yaitu partisipasi yang tinggi, sehingga surat suara tidak mencukupi. Walaupun ada surat suara tambahan, tetapi itu hanya 2,5 persen dari total suara DPT yang ditetapkan, sehingga hanya ada beberapa surat suara tambahan, sedangkan warga yang akan menyoblos masih banyak.

Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik dalam pemilihan umum di Indonesia, baik tingkat nasional maupun pusat. Ketelitian KPPS dalam menetapkan DPTb juga sangat



diperlukan agar tidak adanya pemilih siluman yang ingin berlaku curang. Partisipasi masyarakat seperti Gambar 1.



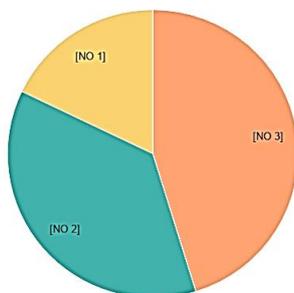
Gambar 1. Dokumentasi Penelitian di TPS 30 Kelurahan Bangka 2017, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Terdapat lima jenis partisipasi politik, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah. Jadi kegiatan pemilihan umum tingkat daerah untuk memilih gubernur DKI Jakarta pada putaran pertama merupakan

bentuk dari partisipasi langsung masyarakat.

Secara keseluruhan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta tentang hasil Pilkada DKI Jakarta putaran pertama menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Jakarta sebesar 74,6 persen dengan 25,4 persen tidak ikut menggunakan hak suara mereka. Tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu sebesar 72,2 persen, adapun laki-laki sebesar 70,6 persen.



1		Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.	17.88% 2.391 suara
2		Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S.	36.90% 4.935 suara
3		Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno	45.22% 6.047 suara

Gambar 2. Hasil real count putaran 1 Pilkada DKI Jakarta 2017 (KPU, 2017)

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan partisipasi tertinggi masyarakat Jakarta dengan tingkat partisipasi sebesar 74,6 persen. Sebelumnya pada tahun 2012 hanya sebesar 65 persen, dan pada tahun 2007 sebesar 66 persen. Dari tahun 2007 ke 2012 menunjukkan angka penurunan, adapun dari tahun 2012 ke 2017 menunjukkan angka peningkatan. Namun, angka-angka statistik tidak dapat menggambarkan kualitas dari partisipasi itu sendiri karena terdapat dua jenis partisipasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington dan Nelson, yaitu partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi.

Partisipasi otonom tentunya lebih baik dibandingkan partisipasi mobilisasi karena partisipasi otonom merupakan partisipasi yang datang atas kesadaran sendiri, bukan atas pengaruh dan paksaan orang lain. Dalam melihat kasus partisipasi dalam Pilkada DKI putaran pertama, terutama pada TPS 30 Kelurahan Bangka, sulit untuk melihat apakah partisipasi seseorang bersifat otonom ataupun mobilisasi. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai hal tersebut, karena kemungkinan adanya indikasi mobilisasi massa untuk memenangkan salah satu calon akan selalu terbuka. Media massa, politik uang, dan lainnya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang awalnya otonom, berubah menjadi mobilisasi karena memilih bukan berdasarkan akal sehatnya lagi.

Berkaitan dengan pernyataan Huntington dan Nelson yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan dan tingkat partisipasi, seperti tingkat sosial ekonomi dalam masyarakat yang tinggi akan menghasilkan partisipasi politik yang tinggi, dan sebaliknya masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar (mapan secara ekonomi), dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari mereka yang tidak berpendidikan atau berpenghasilan rendah.

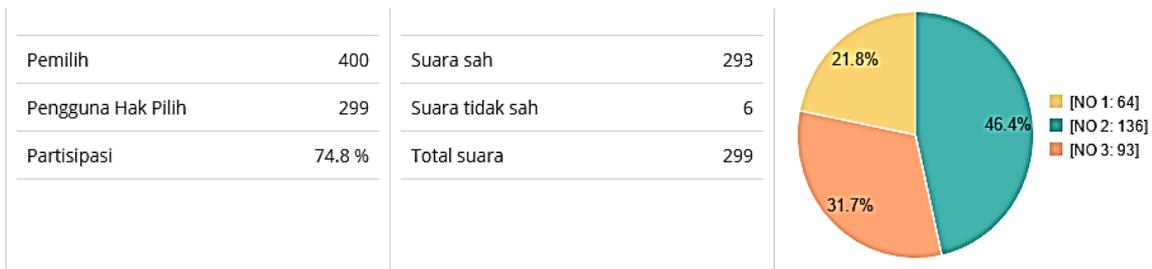
Melihat dalam konteks Pilkada DKI putaran pertama pada TPS 30 Kelurahan Bangka, terdapat kawasan perumahan elite (mewah) yang merupakan lingkungan RT 5 yang menurut ketua RT dan warga sekitar memang menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi setiap diadakan pemilihan umum baik itu tingkat pusat maupun daerah. Dari data yang didapatkan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga dengan perekonomian tinggi (RT 5) dengan jumlah total pemilih 181 orang dengan rincian laki-laki 92 orang dan perempuan sebesar 89 orang, dan angka golput (tidak memilih) sebesar 39 orang. Dibandingkan dengan RT 4 yang merupakan perumahan warga biasa menunjukkan bahwa partisipasi dari kalangan elite lebih tinggi, karena pada RT 4 terdapat 118 orang yang memilih dengan 53 laki-laki dan 65 perempuan namun dengan angka golput



yang lebih tinggi yaitu sebesar 62 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan Huntington dan Nelson terjadi di Indonesia.

Tentunya tinggi rendahnya partisipasi politik tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya yang perlu dilakukan penelitian kembali. Dan

pada TPS 30 ini dimenangkan oleh pasangan nomor 2 yaitu Ahok-Djarot dengan 136 suara mengalahkan pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 64 suara), dan nomor urut 3 Anies dan Sandiaga Salahuddin Uno dengan 93 suara.



Gambar 2. Rekapitulasi TPS 30 Kelurahan Bangka Putaran Pertama (KPU, 2017)

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Bangka di TPS 30 semakin meningkat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 setelah dilakukan perbaikan data pemilih oleh KPU DKI Jakarta (Sari, 2017). Pada

Gambar 3, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di TPS 30 semakin meningkat menjadi 76.3 persen dengan jumlah pemilih 303 dari 397 yang terdaftar. Suara sah sebanyak 302 dan hanya satu suara yang tidak sah.



Gambar 3. Rekapitulasi TPS 30 Kelurahan Bangka Putaran Kedua (KPU, 2017)

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017 di TPS 30 Kelurahan Bangka, memang masih menyisakan permasalahan klasik seperti adanya warga yang tidak tercantum dalam DPT atau warga yang sudah pindah rumah masih tercantum dalam

DPT tersebut. Masalah lainnya juga berkaitan dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mana KPPS harus berhati-hati dalam menggunakan aturan ini, sedikit kesalahan saja akan berakibat terhadap kualitas dari Pilkada itu sendiri, karena isu mobilisasi massa yang semakin gencar yang dapat

menggunakan celah ini untuk memenangkan salah satu calon.

Permasalahan DPT dan DPTb ini haruslah diperbaiki oleh penyelenggara pemilihan umum, agar kualitas Pilkada tetap terjaga, dan agar partisipasi masyarakat tidak menurun. Menurunnya partisipasi masyarakat juga dapat diakibatkan oleh penyelenggaraan Pilkada yang tidak baik. Warga asli yang kecewa namanya tidak tercantum dalam DPT bisa saja berubah menjadi golput pada putaran selanjutnya.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Kelurahan Bangka TPS 30 RW 5 (RT 4 dan 5) termasuk tinggi, terutama partisipasi dari kalangan elite (ekonomi tinggi) yang tinggal di RT 4. Banyaknya masyarakat RT 5 yang hadir dan sedikitnya angka golput (yang tidak menggunakan hak pilih) menunjukkan bahwa partisipasi kaum elite tersebut tinggi. Pernyataan Huntington dan Nelson yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi yang tinggi atau baik akan menghasilkan partisipasi yang tinggi, terbukti di TPS 30 ini. Namun, tentunya juga banyak faktor lain yang mengakibatkan tingginya partisipasi kaum elite tersebut yang perlu diteliti lagi lebih mendalam.

Selain itu, penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama Kelurahan Bangka TPS 30 secara umum berlangsung aman, namun dengan beberapa permasalahan klasik atau permasalahan lama yaitu masalah DPT, sehingga hal tersebut masih menjadi catatan bagi penyelenggara Pilkada.

Adapun penyelenggaraan lainnya berjalan dengan lancar di TPS 30 dan tidak ditemukan adanya sentiment agama. Semua berjalan damai dan teratur. Baik buruknya penyelenggaraan Pilkada akan dapat berakibat pada naik atau turunnya partisipasi politik masyarakat, terutama dalam hal pemilihan umum maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40. www.journal.kpu.go.id
- Budiarjo, M. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bintang Tiga.
- Chalid, P. (2005). *Pilkada Lansung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*. Partnership.
- Dewan Perwakilan Daerah. (2003). *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Hasan, A. M. (2017). Kuatnya Sentimen Agama di Pilgub Jakarta. In *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1990).



- Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- KPU. (2017). Hasil Hitung TPS (Form C1) Kelurahan Bangka. In *Laporan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada 2017*. <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/laporanRekap/1>
- KPU. (2017). KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017. In *Laporan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada 2017*. <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/laporanRekap/1>
- Maulana, A. (2014). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terus Menurun*. <https://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-terus-menurun/>
- Mulyadi, M. (2019). Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. *Info Singkat*, IX(09). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf
- Purwadi, W. (2019). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung versus Pemilihan Perwakilan. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 78–89. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Sari, N. (2017). *KPU DKI Mulai Perbaiki Data Pemilih pada Putaran Kedua Pilkada DKI*.
- Simamora, S. (1985). *Pembangunan Politik Dalam Perspektif*. Afabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhada, A. (2017). *Partisipasi Pemilih di Pilkada DKI Mencapai Rekor Tertinggi - Pilkada Tempo*.